



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dewas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 1 April 2024
Waktu	: 11.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023; 2. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: 1. 42 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Ketua Dewan Pengawas BPKH; 4. Kepala Badan Pelaksana BPKH dan jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi oleh para Wakil Ketua H. Abdul Wachid., H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas Kinerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun 2023, disimpulkan:

1. Komisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan tentang realisasi anggaran Biaya Operasional BPKH Tahun 2023 sebesar Rp377Miliar atau 97,38%, Dana Kelolaan sebesar Rp166,74Triliun atau 100,45%, Nilai Manfaat sebesar Rp10,91Triliun atau 108,99% dan *Virtual Account* Rp3,17Triliun atau 150,95%, Program Kemaslahatan sebesar Rp221Miliar atau 95,41%, dan akan ditindaklanjuti dalam pendalaman.
2. Komisi VIII DPR RI meminta Dewan Pengawas BPKH untuk melakukan reuiu atas kinerja pengelolaan investasi dan penempatan keuangan haji yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Badan Pelaksana BPKH laporan tertulis dan perkembangan investasi di Bank Muamalat serta akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Pelaksana dan/atau Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Menjaga target capaian kinerja pengelolaan keuangan haji Tahun 2024 untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan keuangan haji.
 - b. Membuat standarisasi laporan hasil pengawasan kinerja BPKH kepada Komisi VIII DPR RI
 - c. Meningkatkan portofolio investasi dan penempatan yang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi.
 - d. Melakukan pengelolaan kebutuhan mata uang USD dan SAR untuk kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan investasi secara efektif, efisien dan transparan
 - e. Meningkatkan realisasi penyaluran program kemaslahatan dan meningkatkan pengelolaan Dana Abadi Umat.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI mengenai jemaah haji yang tidak semestinya berangkat dan mendapatkan alokasi nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

- g. Melakukan penghematan biaya operasional BPKH Tahun 2024 dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- h. Pembiayaan BPIH tahun 1445 H/ 2024 M hendaknya mengacu kepada Keppres nomor 6 tahun 2024 tentang BPIH tahun 1445 H/ 2024 M.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,


DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si